
PERAN INDONESIA DALAM KERJASAMA ASEAN-KOREA SELATAN MELALUI ASEAN-KOREA CENTRE

Windy Dermawan¹ & Annisa Rohmaniah²

¹²Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran & Peneliti Pusat Studi ASEAN Universitas Padjadjaran

Email: windy.dermawan@unpad.ac.id

Abstract

Cooperation between ASEAN and South Korea has been established since 1989. Until now, various kinds of cooperation have been implemented, one of which is the ASEAN-Korea Centre, an intergovernmental organization that aims to promote exchanges between South Korea and ASEAN member countries. Indonesia, as one of the member countries of ASEAN-Korea Centre, implements its foreign policy based on active and independent principle through the various role in supporting ASEAN-Korea Centre programs. This research is aimed to analyse the roles that Indonesia plays in the ASEAN-Korea Centre using the concept of national role conceptions from Holsti. The process of collecting and analyzing data is done by qualitative methods through the process of interviews, literature studies and content analysis. The result shows that Indonesia has a national role conception as a regional leader, active independent, and regional-subsystem collaborator in the ASEAN-Korea Centre. Indonesia's national role in the ASEAN-Korea Centre has strengthened Indonesia's international reputation and supported a variety of Indonesian diplomacy in ASEAN.

Keywords: ASEAN, ASEAN-Korea Centre, Indonesia, national role, South Korea

A. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia aktif terlibat dalam berbagai kerjasama yang dilaksanakan oleh ASEAN dengan mitranya, salah satunya adalah Korea Selatan. ASEAN dan Korea Selatan telah bekerjasama sejak tahun 1989, awalnya sebagai mitra dialog sektoral dan kemudian menjadi mitra dialog penuh pada tahun 1991. ASEAN menjadikan Korea Selatan sebagai mitra dialognya karena Korea Selatan diyakini akan muncul sebagai pilar integrasi ekonomi di Asia dan dapat menghubungkan ASEAN dengan negara-negara besar lainnya di Asia seperti sebagai India dan Cina (Uriarte Jr., 2008).

Salah satu bentuk kerjasama antara ASEAN dan Korea Selatan adalah ASEAN-Korea Centre, sebuah organisasi antar pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertukaran ekonomi dan budaya di antara para anggotanya. Sejak didirikan pada tahun 2009, ASEAN-Korea Centre telah melakukan ratusan program yang terutama melibatkan masyarakat ASEAN dan Korea Selatan. Program-program di AKC terdiri dari program-program dalam bidang pariwisata, perdagangan dan investasi, serta pertukaran budaya dan orang-ke-orang. Ketiga sektor ini juga menggambarkan hubungan antara ASEAN dan Korea Selatan yang berkembang pesat (Yang & Mansor, 2016). Peran yang dimainkan Indonesia tidak hanya terbatas pada ASEAN itu sendiri, tetapi juga diimplementasikan melalui program-program ASEAN-Korea Centre. Keterlibatan aktif Indonesia dalam program AKC dapat dilihat dari kontribusi dan keseriusannya dalam mempersiapkan dan melaksanakan program-program yang telah dirancang.

Dalam melakukan riset ini, para periset telah meninjau berbagai topik yang relevan terkait dengan riset ini untuk memperluas wawasan dalam melakukan dan menulis riset. Riset-riset yang ditinjau adalah artikel oleh Uriarte Jr. (2008) dan Kulandima (2017) yang membahas hubungan antara ASEAN dan Korea Selatan, riset oleh *ASEAN-Korea Centre with Korean Institute of Southeast Asian Studies* (2017) dan tulisan oleh Yang dan Mansor (2016) yang membahas pertukaran orang-ke-orang dan pertukaran budaya dalam program-program ASEAN-Korea Centre, serta riset oleh Hermanns (2013), O'Neil (2015), dan Karim (2018) yang membahas tentang Korea Selatan sebagai negara *middle power* di Asia ditinjau dari teori konsepsi peran nasional negara tersebut. Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya yang dijelaskan di atas, periset akan fokus pada kerja sama antara ASEAN dan Korea Selatan di ASEAN-Korea Centre untuk mengetahui peran Indonesia dalam program yang diselenggarakan oleh ASEAN-Korea Centre menggunakan teori konsepsi peran nasional yang diusulkan oleh Holsti.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsepsi peran nasional adalah salah satu indikator yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Teori ini diusulkan oleh K. J. Holsti. Holsti mengembangkan kerangka teori tentang NRC dalam studinya yang diterbitkan pada tahun 1970 tentang konsepsi peran nasional dalam studi kebijakan luar negeri untuk membantu menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara.

Menurut Holsti, konsepsi peran nasional meliputi definisi pembuat kebijakan luar negeri mengenai jenis keputusan umum, komitmen, aturan dan tindakan yang sesuai dengan negara mereka, dan juga tentang fungsi negara yang harus dijalankan secara berkelanjutan di sistem internasional atau sistem regional. Pembuat kebijakan akan merumuskan kebijakan luar negeri negara mereka sesuai dengan konsepsi peran yang ada. Negara tidak hanya dapat merumuskan peran nasional dari dalam negaranya sendiri, melainkan juga dapat muncul dari lingkungan eksternal.

Peran dan pembentukan konsepsi peran nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor domestik dan internasional. Ketika membentuk konsepsi peran nasional tertentu, pembuat kebijakan luar negeri termotivasi oleh nilai-nilai budaya, norma dan identitas negara yang ada. Mereka menerjemahkan pengaruh-pengaruh ini ke dalam konsepsi peran nasional yang mencerminkan wacana sosial domestik yang lebih luas. Selain faktor ideasional, faktor struktural dan material juga mempengaruhi pembentukan konsepsi peran nasional, yaitu persepsi pembuat kebijakan tentang kemampuan dan peluang negara untuk bertindak dalam sistem internasional. Peran yang diambil adalah citra mereka tentang jenis keputusan, komitmen, aturan, dan tindakan yang sesuai dengan situasi mereka di lingkungan eksternal. Konsep peran nasional adalah interpretasi pembuat kebijakan luar negeri tentang lingkungan internasional dan peluang serta tantangan yang mereka hadapi (Holsti, 1970).

Berdasarkan literatur sebelumnya, Holsti merumuskan 17 kategori konsepsi peran nasional yang disusun berdasarkan tingkat kepasifan atau kegiatan kebijakan luar negeri yang dilibatkan dalam konsepsi peran, yaitu:

1. *Bastion of revolution-liberator*, negara merasa memiliki tugas untuk memimpin gerakan revolusioner di luar negeri dan membebaskan pihak lain atau bertindak sebagai 'benteng' (*bastion*) dalam gerakan revolusioner.
2. *Regional leaders*, mengacu pada tugas pemerintah suatu negara untuk bertindak sebagai pemimpin di daerah tertentu.
3. *Regional protector*, mengacu pada fungsi memberikan perlindungan untuk wilayah yang berdekatan.
4. *Active independent*, menunjukkan upaya aktif untuk membangun hubungan dengan sebanyak mungkin negara.
5. *Liberation supporters*, mengindikasikan kewajiban formal untuk mengelola, memimpin, atau secara fisik mendukung gerakan pembebasan di luar negeri.
6. *Anti-imperialist agent*, ketika imperialisme dipandang sebagai ancaman serius, banyak pemerintah melihat diri mereka sebagai agen yang berjuang melawan imperialisme.
7. *Defender of the faith*, mengacu pada pembelaan sistem nilai untuk menjamin kemurnian ideologis sekelompok negara lain.
8. *Mediator-integrator*, merujuk pada tanggung jawab untuk merekonsiliasi konflik yang terjadi di antara negara-negara lain.
9. *Regional-subsystem collaborator*, mengacu pada upaya kerja sama dengan negara lain untuk membangun masyarakat yang lebih luas.
10. *Developer*, menunjukkan tugas atau kewajiban khusus untuk membantu negara-negara miskin.
11. *Bridge*, tindakan sebagai 'penerjemah' atau pengantar pesan dan informasi antara orang-orang dari berbagai negara.

12. *Faithful ally*, digunakan hanya ketika pemerintah membuat komitmen khusus untuk mendukung kebijakan pemerintah lainnya.
13. *Independent*, menekankan unsur kebijakan untuk menentukan nasib sendiri.
14. *Example*, menekankan pentingnya mempromosikan prestise dan mendapatkan pengaruh dalam sistem internasional dengan mencapai kebijakan domestik tertentu.
15. *Internal development*, mengacu pada tugas atau fungsi spesifik dalam sistem internasional.
16. *Isolate*, mengacu pada pengasingan dari dunia luar dan menekankan kemandirian (*self-reliance*).
17. *Protectee*, mengacu pada pemerintah yang menuntut tanggung jawab negara lain untuk melindungi negara mereka.

C. METODE

Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap sejumlah informan yang relevan dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara flow model dimulai dari pengumpulan data, display dan analisis data, dan penarikan simpulan. Data yang digunakan untuk riset ini didasarkan pada faktor dan komponen konsepsi peran nasional Holsti untuk mengidentifikasi dan menggambarkan kategori peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN-Korea Selatan melalui ASEAN-Korea Centre.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh, riset ini menunjukkan bahwa ada tiga dari tujuh belas konsepsi peran nasional oleh Holsti yang relevan dengan konsepsi peran nasional Indonesia dalam ASEAN-Korea Centre. Konsepsi peran nasional tersebut adalah *regional leader*, *active independent*, dan *regional-subsystem collaborator*. Berikut ini adalah hasil dan diskusi.

1. Indonesia sebagai *Regional Leader* di ASEAN

Salah satu aturan dalam menentukan konsepsi peran nasional suatu negara secara akurat adalah dengan menganalisis pernyataan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan tingkat tinggi di negara tersebut. Pernyataan tersebut memberikan gambaran umum tentang perspektif pembuat kebijakan tentang negara mereka sendiri. Untuk menentukan apakah Indonesia memiliki konsepsi peran nasional sebagai *regional leader*, dapat ditemukan dengan menganalisis pidato dari pembuat kebijakan tingkat tinggi negara tersebut, yaitu presiden dan menteri luar negeri, dari periode tahun 2009 hingga 2018.

Pidato yang membuktikan kepemimpinan Indonesia di ASEAN disampaikan oleh Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 2011 Marty Natalegawa, dan Menteri Luar Negeri Indonesia saat ini Retno Marsudi pada tahun 2016. Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011 disampaikan pada KTT ASEAN ke-19 di Bali, Indonesia. Dalam pidatonya, Presiden menyatakan:

“Dengan modal dan posisi ini, saya percaya ASEAN mampu untuk berkontribusi dalam respon berbagai dinamika global tersebut. Hal ini sejalan dengan tema Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini: “Komunitas ASEAN di antara Komunitas Global Bangsa-bangsa”. Maknanya, ASEAN ingin berperan lebih besar dalam urusan dunia: to outreach to the world” (Antara News, 2011).

Kemudian, dalam Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2011, Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty M. Natalegawa menyatakan:

“Sepanjang tahun 2010, Indonesia telah berkontribusi dengan menunjukkan ‘intellectual leadership-nya’ dalam pembahasan mengenai regional architecture building ... Pada tahun 2011 ini, Indonesia akan terus melanjutkan kepemimpinannya dengan memantapkan agenda dan peran strategis East Asia Summit” (ASEAN, 2011).

Sedangkan dalam Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 2016, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L. P. Marsudi menyatakan:

“Banyaknya perwakilan asing di Indonesia semakin mengukuhkan Jakarta sebagai ‘Diplomatic Capital of ASEAN’. Indonesia telah memainkan berbagai peran penting di ASEAN. Salah satunya adalah menggagas perampingan (streamlining) pertemuan-pertemuan ASEAN dan penguatan Sekretariat ASEAN ... Indonesia juga menjadi inisiator penguatan kapasitas ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR)” (Kemlu, 2016).

Konsepsi peran nasional Indonesia sebagai *regional leader* di ASEAN mencapai puncaknya pada tahun 2011 dalam kepemimpinannya selama satu tahun. Selama kepemimpinannya, Indonesia berkontribusi dengan menunjukkan kepemimpinan intelektualnya di ASEAN melalui pembangunan arsitektur regional. Hal ini diimplementasikan melalui dilibatkannya Rusia dan Amerika Serikat ke dalam EAS (*East Asia Summit*) pada 2011. Bentuk lain dari kepemimpinan Indonesia di ASEAN adalah Jakarta yang menjadi Ibukota Diplomatik ASEAN, pelurusan (*streamlining*) pertemuan-pertemuan ASEAN, dan menjadi inisiator kerja sama di ASEAN seperti AIPR. Prestasi Indonesia selama kepemimpinannya di ASEAN pada tahun 2011 mencakup implementasi tiga pilar Komunitas ASEAN. Indonesia juga berhasil menjaga ketertiban dan sentralitas wilayah yang kondusif. Keterlibatan aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian di kawasan ditunjukkan dalam penyelesaian berbagai konflik yang terjadi. Di bawah kepemimpinan Indonesia, terdapat berbagai pertemuan termasuk KTT Asia Timur di mana Indonesia mengundang Amerika Serikat dan Rusia. Keterlibatan kedua negara ini membantu proses pembangunan kepercayaan (*trust-building*) di kawasan Asia Tenggara (ASEAN, 2011).

Implementasi konsepsi peran nasional Indonesia sebagai *regional leader* berasal dari persepsi tradisional negara tersebut sebagai pemimpin alamiah ASEAN dan superioritasnya dibandingkan dengan anggota ASEAN lainnya, seperti dalam hal kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan manusia, keseriusannya dalam menyelesaikan konflik di Asia Tenggara, dan inisiatif

Indonesia dalam memprakarsai berbagai bentuk kerja sama di ASEAN (ASEAN, 2011).

51 tahun sejak berdirinya ASEAN, Indonesia telah memainkan banyak peran utama dalam organisasi tersebut. Pada awal terbentuknya ASEAN, Indonesia bertindak sebagai satu dari lima pendiri ASEAN bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Indonesia memiliki ambisi untuk menjadikan ASEAN sebagai organisasi regional yang kuat dan terkemuka di dunia. Oleh karena itu, Indonesia menjadikan ASEAN sebagai pilar utama kebijakan luar negeri negaranya dengan harapan ASEAN akan membantu Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya di Asia Tenggara atau di forum internasional.

Indonesia seringkali dianggap sebagai pemimpin alami ASEAN karena wilayah geografisnya yang luas, jumlah penduduk yang besar, posisi negaranya yang strategis, serta sumber daya alam dan manusia yang melimpah (Emmers, 2014). Misalnya, dalam hal populasi, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia yaitu sekitar 250 juta orang. Indonesia memiliki setidaknya 42% dari total populasi di pasar ASEAN. Hal ini menyiratkan bahwa Indonesia adalah pasar yang besar dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Banyaknya sumber daya manusia di Indonesia adalah salah satu faktor yang menarik perhatian pihak eksternal untuk berkolaborasi dengan ASEAN. Dengan adanya MEA, Indonesia dapat menggunakan sumber daya manusianya untuk meningkatkan perekonomian negara.

Bentuk organisasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN dapat dilihat dalam beberapa hal, salah satunya adalah Indonesia menjadi negara tempat Sekretariat ASEAN berada, tepatnya di Jakarta. Pada tahun 2011, Jakarta dipersiapkan untuk menjadi ibukota diplomatik ASEAN yang bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan Komunitas ASEAN yang akan datang pada tahun 2015 (ASEAN Secretariat News, 2012). Indonesia juga merupakan negara tempat KTT ASEAN pertama kali diadakan. Satu tahun setelah ASEAN

didirikan, para pemimpin dari masing-masing negara mengadakan KTT ASEAN pertama di Bali, Indonesia. Pada KTT tersebut, ASEAN meratifikasi Deklarasi ASEAN (atau Deklarasi Bangkok) yang menetapkan beberapa program aksi dalam hal kerja sama ekonomi dan jenis kerja sama lainnya. ASEAN juga menyatakan kesiapannya untuk mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara lain di luar kawasan Asia Tenggara (ASEAN Secretariat, 2003).

Indonesia juga bertindak sebagai penggagas beberapa kerja sama di ASEAN, seperti *ASEAN Security Community* (ASC), suatu kerangka kerja untuk memfasilitasi kerja sama politik dan keamanan di ASEAN (Tempo, 2004). Selanjutnya, pada KTT ASEAN ke-12 tahun 2007, konsep ASC diperluas untuk mencakup kerja sama politik dan kemudian disebut sebagai *ASEAN Political-Security Community* (APSC). Cetak biru (*blueprint*) APSC kemudian diadopsi pada KTT ASEAN ke-14 pada tahun 2009. Tujuh tahun setelah implementasi cetak biru, APSC telah membangun landasannya dengan memperdalam dan memperluas kerja sama politik dan keamanan ASEAN dan memperkuat kapasitas ASEAN untuk menanggapi tantangan regional dan internasional. Dalam mencapai tujuannya, APSC memperkuat kapasitas kelembagaan dan keberadaannya melalui penyederhanaan proses kerja ASEAN, meningkatkan efektivitas, efisiensi dan koordinasi di dalam ASEAN (ASEAN, 2017).

Bentuk lain dari kerja sama ASEAN yang diprakarsai oleh Indonesia adalah AICHR (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*), sebuah lembaga yang mendorong perlindungan hak asasi manusia di ASEAN. AICHR diresmikan oleh para pemimpin ASEAN pada 23 Oktober 2009 pada KTT ASEAN ke-15 di Cha-Am Hua Hin, Thailand. Pembentukan AICHR didasarkan pada komitmen ASEAN untuk mencapai strategi yang bersifat *forward-looking* untuk memperkuat kerja sama regional dalam hal hak asasi manusia (Madu, 2016). Selain sebagai inisiator pembentukan AICHR, Indonesia juga aktif dalam berbagai program dan kegiatan AICHR, seperti melakukan dialog mengenai hak asasi manusia di ASEAN dan memberikan rekomendasi untuk

memperkuat lembaga-lembaga HAM ASEAN. Sebagai contoh, Indonesia melakukan dialog antara pemerintah Indonesia dan perwakilan negara AICHR pada tanggal 25 Juni 2013 di Sekretariat ASEAN. Dialog ini membahas mekanisme HAM regional dan isu-isu yang berhubungan dengan HAM dan diharapkan dapat memperbaiki situasi HAM di Indonesia dan ASEAN serta mengatasi tantangan di masa depan (AICHR, 2013).

Berdasarkan penjelasan di atas, periset menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki konsepsi peran nasional sebagai *regional leader* di ASEAN. Di ASEAN-Korea Centre, Indonesia secara aktif terlibat dalam banyak program yang dilakukan oleh AKC, baik sebagai peserta atau sebagai negara tuan rumah di mana suatu program diadakan. Kepemimpinan Indonesia dapat dilihat dari Indonesia yang menyelenggarakan beberapa program AKC dan bagaimana Indonesia mengajak anggota AKC lainnya untuk secara aktif terlibat dalam program AKC. Indonesia memanfaatkan AKC secara optimal dengan selalu aktif berpartisipasi dalam berbagai program dengan mengirimkan delegasi atau pejabat pemerintah. Oleh karena itu, Indonesia memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional di Asia Tenggara melalui keterlibatan aktifnya di ASEAN-Korea Centre.

2. Indonesia sebagai *Active Independent* dalam ASEAN-Korea Centre

Baik sebagai anggota ASEAN atau ASEAN-Korea Centre, Indonesia selalu berpartisipasi aktif dalam program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh keduanya. Indonesia melakukan berbagai peran dalam program dan kegiatan tersebut, misalnya menjadi inisiator, negara tuan rumah, atau sebagai salah satu negara peserta. Peran Indonesia ini sesuai dengan konsepsi peran nasional yang disebut *active independent* yang juga sejalan dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu bebas (independen) dan aktif. Indonesia berupaya menerapkan kebijakan luar negerinya dengan menciptakan hubungan diplomatik dengan sebanyak mungkin negara. Dalam praktiknya,

kebijakan luar negeri Indonesia yang diterapkan di ASEAN diarahkan pada diplomasi, persahabatan, dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Keaktifan Indonesia sebagai salah satu anggota AKC juga tercermin dalam pidato yang disampaikan oleh Ketua Delegasi Indonesia pada Pertemuan Tahunan ke-8 Dewan ASEAN-Korea Centre di Seoul pada tahun 2016:

“Peningkatan peran Indonesia di ASEAN-Korea Centre (AKC) sangat penting dalam menopang pertumbuhan nilai ekspor dan investasi di kawasan. Oleh sebab itu, Indonesia akan terus berperan aktif dalam setiap program AKC di tahun 2016 dan memanfaatkannya secara optimal guna meningkatkan daya saing produk-produk unggulan dan potensial Indonesia, khususnya UKM sesuai dengan Visi ASEAN 2025” (PTRI ASEAN, 2016).

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Arlinda sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dalam menyambut salah satu program AKC, *ASEAN Train*.

“Indonesia menegaskan dukungan dan kesiapannya dalam menyukseskan kegiatan ini. Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Ekonomi Kreatif, dan kementerian terkait untuk melakukan persiapan lebih lanjut” (Kemendag RI, 2019).

Dari dua pernyataan yang disampaikan oleh pejabat pemerintah yang terlibat dalam program yang dilakukan oleh AKC, dapat diartikan bahwa pemerintah Indonesia melalui para pejabatnya di kementerian terkait secara implisit membuktikan konsepsi peran nasional Indonesia sebagai *active independent*. Dalam pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia terus terlibat aktif dalam program AKC dan menggunakannya secara optimal. Juga dinyatakan secara implisit bahwa keterlibatan aktif Indonesia dalam AKC adalah upaya mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sedangkan dalam pernyataan kedua, Indonesia melalui kementerian dan lembaga terkait menyatakan dukungannya untuk keberhasilan salah satu program AKC yang akan diselenggarakan pada 2019 yaitu *ASEAN Train*.

Konsepsi peran nasional Indonesia sebagai *active independent* di ASEAN-Korea Centre sejalan dengan prinsip kebijakan luar negerinya yang disebut

'bebas aktif'. Prinsip ini menyiratkan ketidakberpihakan Indonesia dalam aliansi atau blok politik apa pun di dunia yang tidak sejalan dengan ideologi dan nilai-nilai Pancasila maupun rakyat Indonesia serta selalu secara aktif berpartisipasi dalam hubungan dengan aktor-aktor lain dalam sistem. Prinsip kebijakan luar negeri Indonesia ini digunakan sebagai pedoman untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Andika, 2016). Dalam praktiknya, kebijakan luar negeri Indonesia yang diterapkan di ASEAN diarahkan pada diplomasi, kekerabatan, dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Sejak pembentukan AKC pada tahun 2009 hingga 2018, AKC telah mengadakan sekitar 200 program dari empat unit yang beroperasi dalam organisasi tersebut. Dalam setiap program yang dilakukan oleh AKC setiap tahunnya, Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam program-program tersebut. Dari sekitar 200 program, Indonesia telah berpartisipasi dalam setidaknya setengah dari total program yang telah diselenggarakan. Sebagai contoh, Indonesia telah menjadi tuan rumah (*host country*) beberapa program AKC seperti *Trade and Facilitation Workshop for Indonesian Food MSMEs* di Jakarta pada 4 April 2017, *ASEAN-Korea Tourism Capacity Building Workshop "Lombok: Opening New Dimensions for Korean Travelers"* di Lombok pada 12 Januari 2017, dan *ASEAN Community-based Tourism (CBT) Program 2018* di Yogyakarta pada 3-7 Januari 2019.

Program-program yang diselenggarakan oleh unit *Culture and Tourism* dan *Public Relations and Information Service* memiliki tujuan-tujuan seperti memfasilitasi pertukaran budaya untuk menumbuhkan *mutual understanding* dan meningkatkan kesadaran publik mengenai ASEAN serta mendorong pertukaran pemuda ASEAN dan Korea Selatan. Program-program seperti *ASEAN-Korea Youth Network Program* dan *ASEAN Community-Based Tourism Program* yang melibatkan pemuda dari ASEAN dan Korea Selatan, mendorong adanya pertukaran budaya dan pertukaran orang-ke-orang antara keduanya.

Pada Juni 2019 nanti, AKC akan mengadakan *ASEAN Week* sebagai peringatan HUT ke-30 hubungan ASEAN dan Korea Selatan. Program tersebut ditujukan untuk menyediakan platform bagi para partisipan untuk memperkuat hubungan ASEAN-Korea Selatan dan memperdalam pemahaman mengenai nilai-nilai budaya unik ASEAN. Para partisipan akan mempersembahkan sebuah pertunjukan budaya ASEAN seperti musik, tarian dan makanan khas negara-negara anggota ASEAN.

Konsepsi peran nasional Indonesia sebagai *active independent* dalam AKC juga dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia sebagai kementerian koordinator untuk kementerian lain dalam pelaksanaan program AKC. Keterlibatan mereka mulai dari perencanaan program, pemilihan peserta dari Indonesia, terlibat selama program, hingga evaluasi program. Kedutaan Besar Indonesia di Seoul juga berkoordinasi dengan kementerian terkait di Jakarta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia melalui kementerian dan kedutaan terlibat aktif sepenuhnya dalam program yang diselenggarakan oleh AKC.

Partisipasi Indonesia juga tidak hanya sebatas pemerintah saja, akan tetapi, rakyat Indonesia, baik mereka yang memiliki perusahaan atau individual, juga aktif berperan dalam program-program yang diselenggarakan AKC. Dari tingkat pemerintah, AKC seringkali menerima kunjungan dari pejabat pemerintah Indonesia ke Korea Selatan baik kunjungan dalam rangka menjalin silaturahmi, membahas program-program AKC yang telah dan akan dilaksanakan, atau sebagai perwakilan pemerintah Indonesia dalam program AKC yang saat itu sedang dilaksanakan. Biasanya, perwakilan Indonesia yang dikirim ke Korea Selatan untuk mengikuti suatu program diambil dari kementerian atau badan terkait sesuai dengan program yang sedang dilaksanakan tersebut.

Dari tingkat perusahaan, misalnya, dalam program di bawah unit *Trade and Investment*, perusahaan dari Indonesia sering berpartisipasi dalam program AKC. Sementara itu, dari level individu, masyarakat Indonesia aktif dan

antusias mengikuti program AKC. Salah satunya di *ASEAN-Korea Cultural Exhibition* 2011 dengan judul "*Cross + Scape*". Dalam pameran tersebut, dua seniman Indonesia bernama Iman Hartoyo dan Wimo Ambala Bayang memamerkan karya fotografi kontemporer mereka yang mencerminkan fenomena sosial dan warisan alam Indonesia (ASEAN-Korea Centre, 2011).

Kebijakan luar negeri terbaru Korea Selatan, *New Southern Policy*, memengaruhi konsepsi peran nasional Indonesia sebagai *active independent*. Kecenderungan kebijakan terhadap ASEAN memudahkan negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, untuk lebih banyak berpartisipasi dalam program AKC. Indonesia sangat terbuka untuk kerjasama dan mendukung segala bentuk hubungan positif dengan ASEAN dan Korea Selatan. Sebagai negara koordinator dalam kerja sama ASEAN-Korea Selatan antara 2015-2018, salah satu pencapaian Indonesia adalah peresmian *ASEAN Culture House* di Busan pada 1 September 2017. ACH adalah tempat untuk menampilkan budaya ASEAN dan Korea Selatan sebagai upaya untuk meningkatkan *mutual understanding* antara kedua pihak (Kemenlu, 2017). Keterlibatan Indonesia dalam AKC juga dapat dilihat dari kontribusinya terhadap pendanaan AKC yang digunakan untuk membayar gaji staf Indonesia di Korea Selatan.

Penjelasan di atas menunjukkan keseriusan Indonesia, baik dari pemerintah dan rakyatnya, dalam berpartisipasi dalam program AKC. Dari pemerintah, misalnya, adalah kesiapan kementerian dan kedutaan dalam menangani peserta yang berpartisipasi dalam suatu program. Dari masyarakat, dapat dilihat dari keaktifan dan keseriusan mereka dalam mengikuti serangkaian program yang dilaksanakan dan kesediaan mereka untuk memamerkan karya dan menampilkan budaya Indonesia di depan peserta lain dari anggota AKC lainnya.

3. Indonesia sebagai *Regional-Subsystem Collaborator* dalam ASEAN-Korea Centre

Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada perwujudan Komunitas ASEAN yang terintegrasi dan maju. Keseriusan Indonesia dalam kontribusinya pada Komunitas ASEAN tercermin dalam keterlibatannya dalam program ASEAN-Korea Centre yang mendorong pertukaran budaya dan orang-ke-orang dan menciptakan *mutual understanding*. Hal ini dapat dianalisis dari pernyataan di bawah ini.

Pernyataan yang menunjukkan dukungan Indonesia untuk program AKC yang mendorong pertukaran budaya dan karenanya secara tidak langsung meningkatkan *mutual understanding* antara ASEAN dan Korea Selatan disampaikan oleh pejabat pemerintah di Kementerian Perdagangan Indonesia.

“Indonesia menyambut baik sinergi program kerja AKC yang lebih difokuskan pada pertukaran budaya yang ditandai dengan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program kebudayaan pada tahun 2017 jika dibandingkan pada tahun 2016” (Kemlu RI, 2017).

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Arlinda sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Indonesia dalam dukungannya untuk program AKC yang disebut *ASEAN Train*.

“Program ASEAN Train merupakan kesempatan Indonesia memperkenalkan budaya dan kreativitas Indonesia agar lebih dikenal masyarakat Korea Selatan. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta kedekatan antara masyarakat kedua negara yang nantinya berpengaruh kepada sektor pariwisata, investasi, dan perdagangan Indonesia” (Kemendag RI, 2019).

Keduanya menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik program kerja AKC yang fokus pada pertukaran budaya dan melalui program AKC Indonesia mampu memperkenalkan budaya dan kreativitasnya kepada masyarakat Korea Selatan. Hal ini akan meningkatkan kedekatan antara rakyat kedua negara.

Konsepsi peran nasional *regional-subsystem collaborator* Indonesia tidak dapat dipisahkan dari atribut nasional Indonesia yang memiliki budaya yang

beragam dan kaya serta masyarakat yang berasal dari ras dan etnis yang berbeda. Ideologi Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika" yang secara harfiah berarti "Persatuan dalam Keragaman" memotivasi para pembuat kebijakan luar negeri untuk mengadopsi konsepsi peran nasional *regional-subsystem collaborator*. Rakyat Indonesia terbiasa hidup dalam keanekaragaman sehingga membangun komunitas yang lebih luas melalui ASEAN dan AKC dengan negara anggota ASEAN lainnya dan Korea Selatan akan mengembangkan *mutual understanding* di antara mereka. Pemahaman tersebut ini berasal dari pertukaran budaya dan orang-ke-orang dalam program AKC.

Konsepsi peran nasional Indonesia sebagai *regional-subsystem collaborator* diimplementasikan dalam banyak cara, salah satunya adalah bagaimana Indonesia mempersiapkan diri untuk Komunitas ASEAN pada tahun 2015, terutama ASCC (*ASEAN Socio-Cultural Community*). Inti dari ASCC adalah komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup di ASEAN melalui kegiatan yang berorientasi pada orang (*people-oriented*) dan kegiatan yang berpusat pada orang (*people-centred*) yang mencakup berbagai bidang termasuk pertukaran budaya, pemberdayaan kaum muda, dan pendidikan. Indonesia terlibat dalam realisasi ASCC dengan partisipasinya dalam program AKC sesuai dengan cetak biru ASCC. Untuk menciptakan Komunitas ASEAN yang terintegrasi secara sosial dan budaya, ada berbagai langkah yang diambil oleh Indonesia. Kehadiran ASEAN-Korea Centre memungkinkan untuk mengakomodasi hal ini karena ASEAN dan AKC memiliki negara anggota yang sama, di mana di AKC terdapat Korea Selatan sebagai salah satu anggota lainnya. Tujuan ASCC juga sejalan dengan salah satu tujuan AKC yaitu untuk memperkaya pertukaran budaya dan orang-ke-orang.

Indonesia mendukung kegiatan pertukaran budaya melalui pertukaran orang-ke-orang dalam program yang dilakukan oleh AKC dengan mengirim peserta atau delegasi Indonesia ke Korea Selatan atau program yang diadakan di negara-negara ASEAN. Dengan secara langsung melibatkan akar rumput (*grassroot*) Indonesia dalam program AKC, seperti pelajar, seniman, pengusaha,

atau praktisi dengan keahlian di bidang tertentu, Indonesia membantu meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang ASEAN dan Korea Selatan serta pemahaman masyarakat ASEAN dan Korea Selatan tentang Indonesia.

Konsepsi peran nasional ini juga dilaksanakan dengan cara menampilkan pertunjukan budaya dan mengirim delegasi sehingga pertukaran dan interaksi antara delegasi, terutama kaum muda, terjadi secara langsung dan tanpa perantara dan mereka dapat menciptakan *mutual understanding* secara efektif. Selain sebagai diplomasi budaya, konsepsi peran nasional ini juga dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antara ASEAN dan Korea Selatan. Keberadaan AKC menyediakan wadah bagi para peserta untuk mempromosikan budaya mereka sendiri. Dalam banyak program, interaksi antara peserta menyebabkan pertukaran informasi menjadi efektif dan menyenangkan.

Konsepsi peran nasional Indonesia sebagai *regional-subsystem collaborator* juga dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri Korea Selatan yang disebut sebagai *New Southern Policy*. Prinsip inti dari kebijakan ini adalah diplomasi yang berpusat pada rakyat. Kebijakan ini menekankan inisiasi sosial budaya. Presiden Moon Jae-in menyatakan bahwa kebijakan luar negeri yang baru akan dilaksanakan dengan menghormati pendapat publik di antara semua anggota asosiasi, mendapatkan dukungan mereka, dan mengundang partisipasi langsung mereka. Hubungan antara Korea Selatan dan ASEAN serta India akan dilakukan dengan komunikasi simetris dan keterlibatan dalam dua arah. ASEAN-Korea Centre dianggap sebagai salah satu dari banyak organisasi antara ASEAN dan Korea Selatan yang akan digunakan sebagai wadah untuk mengelola dan mengkomunikasikan apa yang akan dicapai dari kebijakan tersebut ditinjau dari pengalamannya dalam mengawasi pertukaran pemuda, program seni dan budaya, mendorong perdagangan dan investasi, pengembangan kapasitas, jejaring dengan media regional dan nasional, dan mengalokasikan informasi dan data kepada pemerintah (Anantasirikiat, 2018).

AKC dianggap sebagai forum yang efektif untuk mencapai tujuan ini karena program-programnya telah terbukti mampu membawa orang-orang dari kedua belah pihak melalui proses pertukaran budaya dan *mutual understanding* di dalamnya.

KESIMPULAN

Indonesia menjalankan peran nasional sebagai *regional leader*, *active independent* dan *regional-subsystem collaborator* dalam ASEAN-Korea Centre. Tiga kategori konsepsi peran nasional Indonesia tersebut dapat dilihat dari komitmen dan tindakannya yang juga didukung oleh nilai-nilai yang dibawa oleh Indonesia dan peluang dari Korea Selatan melalui *New Southern Policy* dan program-program ASEAN-Korea Centre. Riset ini memiliki keterbatasan dalam penggunaan metodologi, yaitu tidak menggunakan konten analisis untuk menganalisis teks pidato atau dokumen resmi pemerintah yang relevan mengenai peran Indonesia. Namun demikian, peneliti menggunakan dokumen-dokumen resmi pemerintah dalam kuantitas cukup banyak untuk menggali fenomena terkait, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan triangulasi data dengan data hasil wawancara agar mampu menjaga validitas hasil riset.

DAFTAR PUSTAKA

- AICHR. (2013). *ASEAN Human Rights Dialogue with the Government of Indonesia*. June 25, 2013. [online] at <http://aichr.org/news/asean-human-rights-dialogue-with-the-government-of-indonesia/>. [accessed on 27 March 2019].
- Anantasirikiat, S. (2018). *Public Diplomacy Strategies for South Korea's New Southern Policy*. July 23, 2018. [online] at <https://www.uscpublicdiplomacy.org/blog/public-diplomacy-strategies-south-korea%E2%80%99s-new-southern-policy>. [accessed on 25 April 2019].
- Andika, M. T. (2016). An Analysis of Indonesia Foreign Policy under Jokowi's Pro-People Diplomacy. *Indonesian Perspective*, 1 (2), 1-13.
- ASEAN. (2017). *ASEAN Political-Security Community (APSC)*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

- ASEAN. 2011. *Keketuaan Indonesia untuk ASEAN 2011*. May 25, 2011. [online] at <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Keketuaan-Indonesia-untuk-ASEAN-2011.aspx> [accessed on 17 March 2019].
- ASEAN-Korea Centre. (2012). *2011 ASEAN-Korea Contemporary Media Art Exhibition Cross+Scape*. March 18, 2012. [online] at https://www.aseankorea.org/eng/Activities/activities_view.asp?pageNum=24&page=1&boa_num=1463&boa_gubun=5&pageReturn=activities&boa_cnt=&S_YEAR=&S_MONTH=&tabgubun= [accessed on 22 May 2019].
- ASEAN Secretariat. (2003). *External Relations*. [online] at <https://www.webcitation.org/5iHpP3qBV?url=http://www.aseansec.org/11832.htm>. [accessed on 29 January 2019].
- ASEAN Secretariat News. (2012). *Jakarta Must be a Diplomatic City Says its Governor*. December 13, 2012. [online] at <https://asean.org/jakarta-must-be-a-diplomatic-city-says-its-governor/> [accessed on 22 January 2019].
- Emmers, R. (2014). Indonesia's Role in ASEAN: A Case of Incomplete and Sectorial Leadership. *The Pacific Review*, 27 (4), 543-562.
- Holsti, K. J. (1970). National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. *International Studies Quarterly*, 14 (3), 233-309.
- Ji, D. (2008). Moon to "actively consider" inviting Kim Jong un to 2019 ASEAN-ROK summit. Desember 14, 2018. [online] at <https://www.nknews.org/2018/11/moon-to-actively-consider-inviting-kim-jong-un-to-2019-asean-rok-summit/> [accessed on 25 April 2019].
- Madu, L. (2016). Pelembagaan Regional Mengenai Hak Asasi Manusia di ASEAN. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(1), 40-49.
- Ministry of Trade RI. (2019). *Dukung ASEAN-Korea Centre, Indonesia Berpartisipasi dalam ASEAN Train*. February 21, 2019. [online] at <http://www.kemendag.go.id/id/news/2019/02/26/dukung-asean-korea-centre-indonesia-berpartisipasi-dalam-asean-train> [accessed on 9 April 2019].
- Ministry of Foreign Affairs (MoFA) RI. (2016). *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. [online] at <https://www.kemlu.go.id/id/pidato/menlu/Pages/PPTM%202016%20Menlu%20RI.pdf> [accessed on 18 March 2019].
- Ministry of Foreign Affairs (MoFA) RI. (2017). *Indonesia Dukung Sinergi Program Kerja ASEAN-Korea Centre 2017, Fokus pada Pertukaran Budaya*. February 17, 2017. [online] at <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-Dukung-Sinergi-Program-Kerja-ASEAN-Korea-Centre-2017,-Fokus-pada-Pertukaran-Budaya.aspx> [accessed on 9 April 2019].
- Ministry of Foreign Affairs (MoFA) RI. (2017). *Menlu Korsel Resmikan ASEAN Culture House di Busan*. September 4, 2017. [online] at <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-Korsel-Resmikan-ASEAN-Culture-House-di-Busan.aspx> [accessed on 27 March 2019].

- PTRI ASEAN. (2016). *Indonesia Dorong ASEAN-Korea Centre 2016 Sesuai Visi ASEAN 2025*. February 23, 2016. [online] at <https://www.kemlu.go.id/id/berita/pages/asean-korean-centre.aspx> [accessed on 6 April 2019].
- Tempo. (2004). *ASEAN Sepakati Rencana Aksi Komunitas Keamanan*. June 30, 2004. [online] at <https://nasional.tempo.co/read/44445/asean-sepakati-rencana-aksi-komunitas-keamanan-asean> [accessed on 24 January 2019].
- Uriarte Jr., D. (2008). *ASEAN-Korea Relations: Enhancing Development Cooperation*. Seoul: ASEAN Foundation.
- Yang, B. R., & Mansor, N. (2016). "South Korea and ASEAN: Strategic Partnership for Building an East Asian Community", in Mansor, Norma, et al, 2016. *The Dynamics of South Korea's Relationship with Asia-Pacific*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.